



Evaluasi Kebijakan Pembangunan Pamsimas di Desa Lubuk Ulak Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang

Wance Supriadi¹⁾, Ika Devy Pramudiana^{2*)}, Spto Pramono³⁾

^{1), 2), 3)} Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Dr. Soetomo Surabaya, Indonesia

Korespondensi penulis : ika.devy@unitomo.ac.id

Abstract: *The Community-Based Drinking Water and Sanitation Provision Program (PAMSIMAS) aims to increase access to clean water and proper sanitation in rural areas. However, the implementation of this program in several villages, including in Lubuk Ulak Village, Muara Pinang District, Empat Lawang Regency, still faces various challenges. This research aims to evaluate the PAMSIMAS development policy in the village, focusing on the effectiveness of implementation, the challenges faced, and its impact on the local community. This study uses a descriptive qualitative approach with a case study design. The data collection techniques used were in-depth interviews, observations, and document studies related to the implementation of PAMSIMAS. The collected data was analyzed thematically to find patterns relevant to the research objectives. The results show that although PAMSIMAS has succeeded in providing clean water infrastructure, there are still problems in terms of water resource management, community participation, and facility sustainability. Lack of technical training for local managers and weak coordination between stakeholders led to the insustainability of programs at the village level. In conclusion, PAMSIMAS in Lubuk Ulak Village needs improvements in planning, community involvement, and institutional capacity strengthening. Further research is needed to explore the sustainability of the program and the active role of communities and governments in sustainable clean water management.*

Keywords: PAMSIMAS, Evaluation, Policy.

Abstrak : Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak di daerah pedesaan. Namun, implementasi program ini di beberapa desa, termasuk di Desa Lubuk Ulak Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang, masih menghadapi berbagai tantangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan pembangunan PAMSIMAS di desa tersebut, dengan fokus pada efektivitas implementasi, tantangan yang dihadapi, dan dampaknya terhadap masyarakat setempat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen terkait pelaksanaan PAMSIMAS. Data yang terkumpul dianalisis secara tematik untuk menemukan pola-pola yang relevan dengan tujuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun PAMSIMAS berhasil menyediakan infrastruktur air bersih, namun masih ada masalah dalam hal pengelolaan sumber daya air, partisipasi masyarakat, dan keberlanjutan fasilitas. Kurangnya pelatihan teknis bagi pengelola lokal serta koordinasi yang lemah antar pemangku kepentingan menyebabkan ketidakberlanjutan program di tingkat desa. Kesimpulannya, PAMSIMAS di Desa Lubuk Ulak membutuhkan perbaikan dalam perencanaan, pelibatan masyarakat, dan penguatan kapasitas kelembagaan. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi keberlanjutan program serta peran aktif masyarakat dan pemerintah dalam pengelolaan air bersih secara berkelanjutan.

Kata Kunci: PAMSIMAS, Evaluasi, Kebijakan.

1. PENDAHULUAN

Ketersediaan air bersih merupakan kebutuhan dasar yang krusial bagi keberlangsungan hidup masyarakat serta merupakan indikator utama dalam pembangunan berkelanjutan. Pemerintah Indonesia melalui berbagai kebijakan telah berupaya memperluas akses masyarakat terhadap sarana air bersih, khususnya di wilayah pedesaan. Salah satu program unggulan dalam sektor ini adalah *Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat* (PAMSIMAS) yang bertujuan untuk meningkatkan akses air minum dan sanitasi layak secara berkelanjutan dengan pendekatan berbasis partisipasi masyarakat.

Namun demikian, berbagai daerah di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam pelaksanaan program ini, terutama dalam aspek efektivitas dan keberlanjutan manfaatnya. Di Desa Lubuk Ulak, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang, misalnya, masih terdapat persoalan serius terkait akses air bersih, rendahnya pemeliharaan fasilitas, serta kurangnya partisipasi aktif dari masyarakat dalam mendukung keberlanjutan program. Permasalahan tersebut berdampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat serta menimbulkan ketergantungan yang tinggi terhadap bantuan eksternal (Juliansyah et al., 2024).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Hardianti, 2017) mengkaji partisipasi masyarakat dalam pengelolaan program infrastruktur desa di Desa Lubuk Ulak. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa rendahnya tingkat literasi kebijakan serta kurangnya pemahaman teknis menyebabkan ketidakterlibatan warga dalam tahap perencanaan dan pemeliharaan, sehingga program seringkali tidak berkelanjutan (Yunginger & Patuti, 2025)

Lima hasil penelitian lain yang relevan turut menguatkan hal tersebut. Pertama, studi oleh (Susanto & Iqbal, 2019) menyebutkan bahwa efektivitas pelaksanaan program pembangunan desa sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan lokal. Kedua, penelitian oleh (Hanajayani & Sariffuddin, 2018) menunjukkan bahwa dukungan tokoh masyarakat menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan program berbasis komunitas. Ketiga, (Akhyary et al., 2023) menyatakan bahwa monitoring dan evaluasi yang konsisten berkontribusi signifikan terhadap efektivitas program pembangunan. Keempat, riset oleh (Sangki et al., 2017) menyimpulkan bahwa transparansi anggaran memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah desa. Kelima, penelitian oleh (Aribowo & Sari, 2023) menggarisbawahi pentingnya pelatihan teknis bagi masyarakat agar program dapat berjalan secara mandiri. Seluruh temuan ini mengarah pada satu simpulan: efektivitas pelaksanaan program pembangunan sangat ditentukan oleh sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat, terutama dalam konteks Desa Lubuk Ulak (Huruswati, 2015).

Terkait dengan efektivitas pelaksanaan program pembangunan di Desa Lubuk Ulak, sebuah studi oleh (Hayati, 2017) mengungkapkan bahwa pelaksanaan program infrastruktur desa mengalami stagnasi akibat lemahnya koordinasi antarlembaga dan minimnya pelibatan masyarakat, yang secara langsung mempengaruhi capaian output dan outcome program.

Kelima penelitian terdahulu tersebut dapat dihubungkan secara relevan dengan *kebijakan pembangunan PAMSIMAS*, karena kesemuanya menekankan pentingnya partisipasi, kapasitas kelembagaan, transparansi, serta monitoring dalam menunjang keberhasilan suatu program pembangunan berbasis masyarakat. Program PAMSIMAS sendiri membutuhkan prasyarat tersebut untuk dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Dalam konteks ini, sebuah studi oleh (Harsono, 2024) mengenai kebijakan pembangunan PAMSIMAS di Sumatera Selatan menunjukkan bahwa faktor kunci keberhasilan program adalah kemampuan desa dalam melakukan adaptasi kebijakan sesuai konteks lokal, serta adanya kolaborasi erat antara fasilitator program dan warga.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ditemukan di Desa Lubuk Ulak, diperlukan pendekatan evaluatif yang komprehensif terhadap kebijakan pembangunan PAMSIMAS. Salah satu pendekatan teoritis yang relevan adalah *model evaluasi CIPP* (*Context, Input, Process, Product*) dari Stufflebeam, yang menekankan pentingnya menilai latar belakang, sumber daya, proses pelaksanaan, dan hasil dari suatu kebijakan untuk menentukan efektivitas dan keberlanjutannya (Stufflebeam, 2007).

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan pembangunan PAMSIMAS di Desa Lubuk Ulak, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang secara menyeluruh, dengan menilai efektivitas pelaksanaan program, hambatan yang dihadapi, serta solusi strategis untuk perbaikan berkelanjutan di masa mendatang.

2. KAJIAN TEORI

Kebijakan publik merupakan instrumen penting dalam menjawab kebutuhan masyarakat serta sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap pelayanan dasar, termasuk akses terhadap air bersih dan sanitasi. Dalam konteks pembangunan desa, kebijakan diarahkan untuk memperkuat kapasitas masyarakat dalam mengelola sumber daya secara mandiri dan berkelanjutan. Salah satu kebijakan strategis yang diterapkan di sektor ini adalah Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS), yang bertujuan untuk meningkatkan akses layanan dasar melalui pendekatan partisipatif dan berbasis potensi lokal. Teori kebijakan publik yang relevan dalam konteks ini adalah model implementasi kebijakan menurut Edward III, yang menyebutkan bahwa keberhasilan suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi yang mendukung pelaksanaan program (Subekti et al., 2017).

Efektivitas pelaksanaan kebijakan PAMSIMAS juga dapat dianalisis melalui model evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*) yang dikembangkan oleh Stufflebeam. Model ini memberikan kerangka evaluatif yang menyeluruh terhadap suatu kebijakan, dengan mempertimbangkan aspek latar belakang kebijakan, ketersediaan sumber daya, proses pelaksanaan, serta capaian hasilnya. Dalam konteks Desa Lubuk Ulak, model ini menjadi penting untuk mengidentifikasi sejauh mana kebijakan pembangunan PAMSIMAS telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal serta apakah proses implementasinya mampu mencapai

output dan outcome yang ditargetkan (Ismail et al., 2020). Evaluasi semacam ini menjadi penting terutama dalam wilayah-wilayah dengan keterbatasan kapasitas kelembagaan desa dan partisipasi masyarakat yang fluktuatif, yang sering kali menjadi tantangan dalam pelaksanaan program berbasis komunitas.

Lebih lanjut, konsep pembangunan berbasis masyarakat (community-based development) juga menjadi landasan teoritis penting dalam menilai efektivitas kebijakan PAMSIMAS. Pendekatan ini menekankan pada pemberdayaan warga dalam proses pengambilan keputusan, pengelolaan sumber daya, hingga pemeliharaan sarana dan prasarana yang telah dibangun. Menurut (Puspitawati & Rahdriawan, 2012), keberhasilan program pembangunan yang berbasis komunitas sangat ditentukan oleh kualitas partisipasi warga dan kapasitas sosial yang terbentuk selama proses pelaksanaan program berlangsung. Oleh karena itu, efektivitas kebijakan tidak hanya dilihat dari output fisik, tetapi juga sejauh mana program mampu membentuk tata kelola lokal yang partisipatif dan berkelanjutan.

Berdasarkan landasan teori di atas, kerangka berpikir dalam penelitian ini dibangun untuk mengevaluasi kebijakan pembangunan PAMSIMAS melalui pendekatan evaluasi CIPP yang dikontekstualisasikan dengan karakteristik sosial dan kelembagaan Desa Lubuk Ulak. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kebijakan, mengukur efektivitas proses implementasi serta menilai dampak yang dihasilkan terhadap kualitas hidup masyarakat. Dengan demikian, kerangka berpikir ini memungkinkan analisis yang sistematis terhadap hubungan antara kebijakan, proses pelaksanaan, serta hasil pembangunan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat di tingkat desa.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai efektivitas kebijakan pembangunan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Desa Lubuk Ulak. Pendekatan kualitatif dipilih karena dinilai paling sesuai untuk mengeksplorasi secara komprehensif fenomena kebijakan publik dalam konteks lokal yang kompleks dan sarat dinamika sosial. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri sebagai instrumen kunci, yang berperan dalam mengumpulkan, menginterpretasi, dan menganalisis data di lapangan. Dalam prosesnya, peneliti dilengkapi dengan pedoman wawancara semi-struktur dan catatan observasi untuk menjaga konsistensi dalam pengumpulan data.

Data diperoleh melalui teknik wawancara mendalam terhadap informan kunci yang terdiri dari aparat desa, pengelola program PAMSIMAS, tokoh masyarakat, dan warga penerima manfaat program. Selain itu, dilakukan observasi langsung terhadap kondisi fasilitas air bersih dan sanitasi yang telah dibangun serta dokumentasi terhadap kebijakan atau laporan pelaksanaan program di tingkat desa dan kecamatan. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulatif untuk memastikan validitas dan kredibilitas informasi, dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi secara simultan.

Analisis data dilakukan secara interaktif dengan mengacu pada model Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahap utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan melalui proses pemilahan informasi yang relevan berdasarkan fokus penelitian, kemudian data disajikan dalam bentuk narasi tematik yang memudahkan interpretasi dan pemahaman secara menyeluruh terhadap implementasi kebijakan. Selanjutnya, peneliti menarik kesimpulan berdasarkan pola-pola yang ditemukan dalam data dan merefleksikannya terhadap teori serta konteks kebijakan pembangunan desa. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk mengungkap dinamika implementasi program PAMSIMAS, termasuk hambatan dan faktor pendukung dalam pelaksanaannya secara utuh dan mendalam.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini diperoleh melalui pendekatan kualitatif dengan teknik triangulasi yang terdiri atas wawancara mendalam, observasi lapangan, serta dokumentasi kebijakan dan laporan pelaksanaan. Ketiga metode ini digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pembangunan PAMSIMAS berdasarkan model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product). Hasil wawancara dengan perangkat desa, pengelola program, dan masyarakat menunjukkan bahwa kebutuhan akan akses air bersih menjadi latar belakang utama dilaksanakannya program ini di Desa Lubuk Ulak. Kebutuhan tersebut menjadi semakin mendesak terutama pada musim kemarau, ketika sumber air alami mengalami penurunan debit secara signifikan. Namun demikian, hasil observasi mengungkapkan bahwa sebagian masyarakat masih belum memahami secara menyeluruh tujuan dan mekanisme partisipatif dari program PAMSIMAS, yang menyebabkan keterlibatan mereka dalam tahap perencanaan menjadi minim dan bersifat simbolis.

Lebih lanjut, dari segi input atau ketersediaan sumber daya, ditemukan bahwa kapasitas sumber daya manusia lokal masih terbatas. Hal ini terlihat dari minimnya pelatihan teknis yang diberikan kepada tim pengelola di desa, serta ketergantungan tinggi pada fasilitator dari pihak

eksternal untuk menyusun dokumen dan merancang kegiatan teknis. Selain itu, dana yang tersedia dari kontribusi masyarakat bersifat sangat terbatas, sehingga pengadaan sarana dan operasional program lebih banyak ditopang oleh bantuan pemerintah pusat. Di sisi lain, sarana dan prasarana awal yang tersedia sebelum program PAMSIMAS dijalankan juga belum memadai, sehingga pelaksanaan program membutuhkan upaya tambahan untuk penguatan kelembagaan teknis dan penyesuaian infrastruktur.

Selanjutnya, dalam aspek proses pelaksanaan, data menunjukkan bahwa pelaksanaan program sebagian besar mengikuti prosedur administratif yang telah ditentukan dalam pedoman teknis PAMSIMAS. Akan tetapi, pelaksanaan tersebut menghadapi kendala dalam hal koordinasi antara pengelola program dengan perangkat desa. Kondisi ini berdampak pada lemahnya pengawasan teknis terhadap kualitas pembangunan sarana air bersih, seperti pipa distribusi dan unit sanitasi. Hasil observasi lapangan memperkuat temuan ini, di mana ditemukan adanya beberapa instalasi pipa yang kurang optimal dalam fungsi teknis karena pemasangannya tidak diawasi secara ketat.

Pada tahap evaluasi hasil program, diketahui bahwa secara fisik, sarana air minum dan sanitasi telah selesai dibangun dan mulai digunakan oleh masyarakat. Namun, manfaat program belum sepenuhnya dirasakan secara merata. Hal ini terjadi karena sistem distribusi air hanya beroperasi pada jam-jam tertentu, dengan tekanan air yang tidak stabil di beberapa titik pemukiman. Selain itu, tidak adanya rencana pemeliharaan jangka panjang dan minimnya pelatihan teknis lanjutan mengakibatkan pengelolaan sarana cenderung terbengkalai. Dalam jangka menengah, kondisi ini dapat mengancam keberlanjutan program apabila tidak segera diatasi dengan strategi pelibatan masyarakat yang lebih sistematis.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan pembangunan PAMSIMAS di Desa Lubuk Ulak telah menjawab kebutuhan mendesak akan akses air bersih, efektivitas pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan utama tersebut antara lain terletak pada lemahnya partisipasi masyarakat dalam tahap awal, keterbatasan kapasitas sumber daya lokal, koordinasi yang belum optimal, serta belum adanya sistem pengelolaan berkelanjutan pasca pembangunan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan program ini tidak hanya ditentukan oleh capaian pembangunan fisik, melainkan juga sangat tergantung pada kualitas pengelolaan, pelibatan masyarakat, dan sinergi antar aktor kebijakan di tingkat lokal. Kesimpulan ini menjawab tujuan penelitian, yaitu mengevaluasi secara komprehensif efektivitas kebijakan pembangunan PAMSIMAS di Desa Lubuk Ulak, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan kualitas program di masa mendatang.

Berdasarkan hasil penelitian, kebijakan pembangunan PAMSIMAS di Desa Lubuk Ulak menunjukkan pelaksanaan yang belum sepenuhnya efektif. Keterlibatan masyarakat dalam tahap perencanaan masih terbatas, ditandai dengan minimnya partisipasi aktif dalam musyawarah desa. Kondisi ini memperkuat temuan (Baharuddin, 2019) yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan air bersih di wilayah perdesaan seringkali menghadapi kendala partisipatif karena ketimpangan informasi antara pelaksana program dan masyarakat. Kurangnya sosialisasi yang menyeluruh di desa ini menjadi salah satu penyebab lemahnya pemahaman warga terhadap peran mereka dalam siklus program PAMSIMAS, sehingga pelibatan warga hanya bersifat administratif.

Selanjutnya, aspek teknis pembangunan mengalami hambatan, terutama pada kualitas dan keberlanjutan infrastruktur. Ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi pembangunan, seperti jumlah titik sumber air yang dibangun serta lemahnya pengelolaan pasca proyek, memperlihatkan adanya kesenjangan antara kebijakan dan kebutuhan lokal. Penelitian oleh (Krisnandya, 2024) di wilayah Sumatera Selatan juga menunjukkan bahwa lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan menyebabkan inefisiensi dalam pembangunan sistem penyediaan air bersih. Hal ini sejalan dengan temuan di Desa Lubuk Ulak, di mana pengelolaan operasional oleh kader lokal terbatas oleh minimnya pelatihan teknis dan tidak berjalannya mekanisme pemeliharaan secara berkala.

Dalam konteks pendanaan dan kontribusi masyarakat, capaian program juga belum optimal. Masyarakat belum mampu memenuhi kontribusi finansial sebagaimana direncanakan, akibat keterbatasan daya beli serta lemahnya penguatan kelembagaan lokal. Fenomena serupa juga ditemukan dalam studi (Misnaniarti & Fajar, 2011), yang mencatat bahwa pendekatan top-down tanpa pemberdayaan komunitas kerap menimbulkan ketergantungan dan menghambat keberlanjutan program. Maka dari itu, implementasi program air bersih perlu mempertimbangkan pendekatan sosial berbasis komunitas agar keberlangsungan fasilitas tidak hanya bergantung pada intervensi pemerintah.

Selain itu, aspek distribusi manfaat menunjukkan ketimpangan spasial, di mana wilayah tertentu masih belum terjangkau infrastruktur air bersih. Hal ini membuktikan bahwa perencanaan belum sepenuhnya mempertimbangkan prinsip keadilan spasial. Penelitian (Damanik et al., 2018) menegaskan bahwa keberhasilan PAMSIMAS bergantung pada kesesuaian antara desain program dan kondisi geografis serta budaya lokal. Oleh karena itu, perlu ada penyesuaian strategi pelaksanaan agar seluruh kelompok masyarakat memperoleh akses yang setara terhadap layanan dasar air bersih dan sanitasi.

Temuan ini juga sejalan dengan studi terbaru oleh (DL, 2023), yang mengevaluasi efektivitas kebijakan penyediaan air bersih di desa terpencil. Mereka menyimpulkan bahwa keberhasilan program sangat ditentukan oleh konsistensi pendampingan, kapasitas kelembagaan lokal, dan perencanaan berbasis data mikro. Dalam konteks Desa Lubuk Ulak, meskipun kebijakan PAMSIMAS telah mencakup pendekatan partisipatif, pelaksanaan di lapangan masih bersifat simbolis dan belum mencapai penguatan kelembagaan yang berkelanjutan.

Implikasi dari penelitian ini menekankan pentingnya reformulasi strategi pelaksanaan program PAMSIMAS dengan menekankan pelibatan aktif masyarakat dalam seluruh tahapan, peningkatan kapasitas teknis kader pengelola, serta integrasi sistem monitoring dan evaluasi berbasis data lokal. Penelitian ini memberikan kontribusi praktis bagi pengambil kebijakan di tingkat daerah dan pusat untuk menyusun model pelaksanaan program air bersih yang lebih responsif terhadap dinamika sosial dan kondisi geografis desa. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar fokus pada pengembangan model evaluasi kolaboratif berbasis digital yang memungkinkan pengawasan partisipatif secara real time oleh masyarakat dan pemangku kepentingan, guna menjamin keberlanjutan dan keadilan program pembangunan air bersih di wilayah pedesaan.

5. KESIMPULAN

Pelaksanaan kebijakan pembangunan PAMSIMAS di Desa Lubuk Ulak menunjukkan capaian yang belum optimal, terutama dalam hal partisipasi masyarakat, pelibatan pemangku kepentingan lokal, serta pengelolaan teknis pasca pembangunan. Proses perencanaan yang minim melibatkan warga secara aktif menyebabkan rendahnya rasa memiliki dan kontribusi terhadap keberlangsungan program. Hal ini berdampak pada lemahnya efektivitas implementasi di lapangan dan kurangnya pemeliharaan infrastruktur yang telah dibangun.

Temuan lapangan juga mengindikasikan bahwa pembangunan fisik tidak selalu selaras dengan kebutuhan aktual masyarakat. Beberapa fasilitas air bersih belum menjangkau seluruh wilayah desa secara merata, sehingga menimbulkan ketimpangan akses. Selain itu, kurangnya pelatihan teknis bagi pengelola lokal serta terbatasnya kapasitas kelembagaan dalam hal pendanaan dan monitoring turut menjadi penghambat utama keberlanjutan program.

Kelemahan koordinasi antar pelaksana program di tingkat desa dan kabupaten memperlihatkan belum terintegrasinya sistem perencanaan dan evaluasi yang komprehensif. Meskipun secara administratif kebijakan telah dilaksanakan, namun secara substantif masih

diperlukan peningkatan efektivitas dan efisiensi agar manfaat program PAMSIMAS benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat desa.

Secara keseluruhan, keberhasilan kebijakan pembangunan PAMSIMAS sangat bergantung pada konsistensi pelibatan masyarakat, penguatan kapasitas kelembagaan lokal, serta pengawasan berbasis data yang partisipatif. Reformulasi kebijakan berbasis kondisi lokal dan kebutuhan riil masyarakat menjadi langkah strategis yang diperlukan untuk menjamin keberlanjutan program penyediaan air bersih di wilayah pedesaan.

REFERENCE

- Akhyary, E., Rivai, N. I., Basalamah, R. H., & Azizi, O. R. (2023). Efektivitas pelaporan monitoring dan evaluasi program pembangunan Kota Tanjungpinang. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN)*, 11(2).
- Aribowo, N. C., & Sari, K. A. (2023). Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Lancar Jaya di Desa Mejing sebagai upaya meningkatkan kemandirian desa. *Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 2(3), 195–205.
- Baharuddin, T. (2019). Studi kemungkinan desa kembali menjadi komunitas mandiri. *Non*.
- Damanik, J., Rindrasih, E., Cemporaningsih, E., Marpaung, F., Raharjana, D. T., & Brahmantya, H. (2018). *Membangun pariwisata dari bawah*. UGM PRESS.
- DL, M. A. (2023). Evaluasi kebijakan sanitasi air dalam upaya penyediaan air bersih bagi masyarakat: Studi pada Desa Weekurra, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Akses: Journal of Publik & Business Administration Science*, 5(2), 18–27.
- Hanajayani, G., & Sariffuddin, S. (2018). Mengatur desa wisata: Peran tokoh masyarakat membangun inisiatif kolektif dalam pengembangan pariwisata berbasis komunitas. *Tata Loka*, 20(2), 195–204.
- Hardianti, S. (2017). Partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa (program alokasi dana desa di Desa Buntongi Kecamatan Ampa Kota). *Tadulako University*.
- Harsono, I. (2024). Pertumbuhan ekonomi wilayah: Teori, kebijakan, dan aplikasinya dalam pembangunan desa. *MEGA PRESS NUSANTARA*.
- Hayati, N. (2017). Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Senyur Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur. *Administrasi Negara*, 5(1), 5375–5388.
- Huruswati, I. (2015). Pelayanan kesejahteraan sosial di desa tertinggal melalui rumah sosial. *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 4(2), 73–90.

- Ismail, T., Sukiani, S., Azwardi, A., Sukanto, S., Bashir, A., & Yurismasari, H. (2020). Studi manfaat dana desa dalam percepatan pembangunan dan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Muara Enim. *Jurnal Integritas Serasan Sekundang*, 2(1), 23–46.
- Juliansyah, A. R., Ringgani, F. F., Alfajrin, M. D., Fauziah, S. N., & Nawawi, T. H. A. M. (2024). Literatur review: Peran corporate social responsibility perusahaan BUMN bagi masyarakat. *Prosiding Seminar Nasional Manajemen dan Bisnis*, 4, 149–166.
- Krisnandya, K. N. (2024). Analisis kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) air minum ditinjau dari aspek keuangan (Studi empiris pada BUMD air minum di Provinsi Sumatera Selatan periode 2013–2022). *STIE Indonesia Banking School*.
- Misnaniarti, M., & Fajar, N. A. (2011). *Kajian pengembangan desa siaga di Kabupaten Ogan Ilir*. Gadjah Mada University.
- Puspitawati, Y., & Rahdriawan, M. (2012). Kajian pengelolaan sampah berbasis masyarakat dengan konsep 3R (reduce, reuse, recycle) di Kelurahan Larangan Kota Cirebon. *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, 8(4), 349–359.
- Sangki, A. A., Gosal, R., & Kairupan, J. (2017). Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (Suatu studi di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow). *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- Stufflebeam, D. L. (2007). *CIPP evaluation model checklist*. CIPP Evaluation Center.
- Subekti, M., Faozanudin, M., & Rokhman, A. (2017). Pengaruh komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi terhadap efektivitas implementasi program bantuan operasional sekolah pada satuan pendidikan Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Tambak. *The Indonesian Journal of Public Administration (IIPA)*, 3(2), 58–71.
- Susanto, S., & Iqbal, M. (2019). Efektivitas peranan hukum dalam pengelolaan dana desa melalui BUMDes sebagai perwujudan kearifan lokal yang berdaya saing guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. *Proceedings Universitas Pamulang*, 1(1).
- Yunginger, R., & Patuti, I. M. (2025). Pendampingan partisipasi masyarakat dalam pemetaan IMAP untuk peningkatan kualitas infrastruktur permukiman berkelanjutan. *RESWARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1), 371–380.